

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Bachtiar dkk. (2002). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat..
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2020, 11 09). Retrieved from SERAHKAN IHPS I TAHUN 2020 KEPADA DPR, BPK UNGKAP 13.567 PERMASALAHAN SEBESAR RP8,97 TRILIUN: <https://www.bpk.go.id/news/serahkan-ihps-i-tahun-2020-kepada-dpr-bpkungkap-13567-permasalahan-sebesar-rp897-triliun>
- Hamzah, A. P. & Nur Aisyah Kustiani (2014). *Seri Akuntansi Pemerintah Indonesia: Dasar-dasar Akuntansi Pemerintah*. Tangerang Selatan: STAN PRESS.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi pemerintahan*. Bogor: In Media.
- Kuangan, D. J. (2020). Retrieved from POSTUR APBD Kab. Lampung Selatan Tahun 2020: <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2020&provinsi=08&pemda=02>
- Komisi Standar Akuntansi Pemerintah. Buletin Teknis Nomor 23 tentang *Pendapatan Non Perpajakan*.
- Komisi Standar Akuntansi Pemerintah. Buletin Teknis Nomor 24 tentang *Pendapatan Perpajakan*.
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang *Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19*.
- Mulyana, Budi. (2014). *Seri Akuntansi Pemerintah: Akuntansi Pemerintah Daerah*. Jakarta: STAN PRESS.
- Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua di Kabupaten Lampung Selatan*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2020 tentang *Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan*.

- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang *Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*.
- Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang *Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.